

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

Rencana program prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 tetap mengacu pada program yang ada didalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas yang melaksanakan 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Program-program tersebut adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Program Prioritas dan SKPD Penanggung Jawab

NO	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD	
1. Urusan Wajib				
1	Pendidikan;	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dindik
		2	Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun	Dindik
		3	Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	Dindik
		4	Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dindik
		5	Pendidikan Tinggi	Dindik
		6	Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)	Dindik
		7	Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	Dindik
2	Kesehatan;	1	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes
		2	Pembinaan Upaya Kesehatan	Dinkes/RSUD Banten
		3	Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Dinkes
		4	Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes
		5	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Dinkes/RSU Malingping
		6	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Dinkes/RSU Malingping/RSUD Banten

NO	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD	
3	Pekerjaan umum;	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas BMTR
		2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas SDAP
		3	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Dinas SDAP
4	Perumahan;	1	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Dinas SDAP
5	Penataan ruang;	1	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Bappeda/BMTR
6	Perencanaan pembangunan;	1	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Bappeda
		2	Pengendalian Pembangunan Daerah	Bappeda/Biro Ekbang
		3	Kerjasama Pembangunan Daerah	Bappeda/Biro Pemerintahan
7	Perhubungan;	1	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian	Dishubkominfo
8	Lingkungan hidup;	1	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	BLHD
		2	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	BLHD/Dishutbun
9	Kependudukan dan catatan sipil;	1	Penataan Administrasi Kependudukan	Biro Pemerintahan
10	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	1	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPMD
11	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;	1	Kependudukan dan Keluarga Berencana	BPPMD
12	Sosial;	1	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Dinsos/BPPMD
		2	Rehabilitasi Sosial	Dinsos
		3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos

NO	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS		SKPD
		4	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Dinsos/ Biro Kesra
13	Ketenagakerjaan;			
		1	Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Disnakertrans
		2	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	Disnakertrans
		3	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	Disnakertrans
14	Koperasi dan usaha kecil dan menengah;			
		1	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Dinkop dan UMKM
		2	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	Dinkop dan UMKM
		3	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM	Dinkop dan UMKM
15	Penanaman modal;			
		1	Peningkatan Iklim Investasi	BKPMPT
		2	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPMPT
16	Kebudayaan;			
		1	Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	Disbudpar
17	Kepemudaan dan olah raga;			
		1	Kepemudaan dan Kepramukaan	Dispora
		2	Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	Dispora
18	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;			
		1	Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol
19	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;			
		1	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Biro Pemerintahan, Biro Ekbang, Biro Humas Protokol, Biro Kesra, dan Kantor Penghubung
		2	Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
		3	Penanggulangan Bencana	BPBD
		4	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Biro Perlengkapan dan Aset

NO	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS		SKPD
		5	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	DPPKD
		6	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Biro Organisasi
		7	Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur	BKD
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Badiklat
		9	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Seluruh SKPD
		10	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Seluruh SKPD
		11	Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat
		12	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Set DPRD
		13	Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	Biro Hukum
		14	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	Balitbangda
20	Ketahanan pangan;			
		1	Ketahanan Pangan Masyarakat	BKPP
21	Pemberdayaan masyarakat dan desa;			
		1	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan	BPPMD
22	Statistik;			
		1	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Seluruh SKPD
23	Kearsipan			
		1	Pembinaan Kearsipan Daerah	Baperpus-arda
24	Komunikasi dan informatika;			
		1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika	Dishubkominfo/ Set. KPID
25	Perpustakaan.			
		1	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Baperpus-arda
		2	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Baperpus-arda
2. Urusan Pilihan				
1	Pertanian;			
		1	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan	Distanak/DKP/ Dishutbun

NO	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD	
			Perkebunan	
		2	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Distanak/DKP/ Dishutbun
		3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Distanak/BKP/ Dishutbun
		4	Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian	Distanak
2	Kehutanan;			
		1	Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan	Dishutbun
3	Energi dan Sumber Daya Mineral;			
		1	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Distamben
		2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Distamben
		3	Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	Distamben
4	Pariwisata;			
		1	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	Disbudpar
		2	Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	Disbudpar
5	Kelautan dan perikanan;			
		1	Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	DKP
6	Perdagangan;			
		1	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Disperindag
7	Industri;			
		1	Peningkatan Daya Saing Industri	Disperindag
8	Ketransmigrasian			
		1	Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi	Disnakertrans
JUMLAH		78 Program		42 SKPD

Sedangkan untuk rencana kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten mengalami beberapa perubahan. Belanja Langsung pada Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 ini direncanakan menurun sebesar 7,75% atau sebesar Rp3.329.740.023.532,00. Dengan demikian ada penurunan anggaran belanja langsung bila dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.609.341.540.600,00 sehingga pada Perubahan RKPD Tahun 2016 ini menjadi sebesar Rp3.425.546.880.693,00.

Perubahan ini merupakan langkah awal yang ditempuh dalam rangka mengefisiensikan dan mengefektifitaskan belanja daerah khususnya belanja langsung seluruh SKPD Provinsi Banten guna mempercepat pencapaian target 2016 dengan tetap mengacu pada tema pembangunan dan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.

Adapun rencana pagu indikatif belanja langsung SKPD dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 secara lengkap disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung SKPD Dalam Perubahan RKPD
Provinsi Banten Tahun 2016

NO	SKPD	APBD TA 2016	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016	SELISIH (+/-)
1	2	3	4	5
1	Badan Pendidikan dan Pelatihan	55.000.000.000	42.811.773.000	(12.188.227.000)
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa	28.150.000.000	28.249.000.000	99.000.000
3	Badan Lingkungan Hidup Daerah	27.669.740.000	25.430.635.000	(2.239.105.000)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.950.000.000	29.201.922.734	(3.748.077.266)
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.000.000.000	39.437.040.319	3.437.040.319
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.900.000.000	19.848.000.000	(2.052.000.000)
7	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	30.288.000.000	25.916.878.600	(4.371.121.400)
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.800.000.000	14.771.507.702	(2.028.492.298)
9	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	22.000.000.000	15.838.470.895	(6.161.529.105)

NO	SKPD	APBD TA 2016	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016	SELISIH (+/-)
1	2	3	4	5
10	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	21,000,000,000	19.392.249.895	(1.607.750.105)
11	Badan Kepegawaian Daerah	15.000.000.000	16.265.703.200	1.265.703.200
12	Biro Perlengkapan Dan Aset	133.300.000.000	137.150.000.000	3.850.000.000
13	Biro Umum	65.572.000.000	65.796.603.900	224.603.900
14	Biro Kesejahteraan Masyarakat	33.439.067.000	31.593.165.000	(1.845.902.000)
15	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	29.530.000.000	28.454.852.171	(1.075.147.829)
16	Biro Humas Dan Protokol	17.959.000.000	17.616.381.018	(342.618.982)
17	Biro Pemerintahan	12.000.000.000	12.133.267.705	133.267.705
18	Biro Organisasi	7.600.000.000	7.447.467.282	(152.532.718)
19	Biro Hukum	7.000.000.000	6.962.735.750	(37.264.250)
20	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang	906.847.796.000	851.572.872.310	(55.274.923.690)
21	Dinas Pendidikan	350.261.600.000	327.985.250.476	(22.276.349.524)
22	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman	467.486.040.000	429.197.229.850	(38.288.810.150)
23	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	110.470.810.000	104.371.282.567	(6.099.527.433)
24	Dinas Kesehatan	122.567.790.000	113.861.011.000	(8.706.779.000)
25	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	115.000.000.000	121.460.628.600	6.460.628.600
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	101.656.000.000	58.280.000.000	(43.376.000.000)
27	Dinas Pertambangan dan Energi	44.000.000.000	21.507.572.500	(22.492.427.500)
28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23.500.000.000	31.714.000.000	8.214.000.000
29	Dinas Sosial	52.903.000.000	52.922.890.000	19.890.000
30	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.000.000.000	22.658.517.209	1.658.517.209
31	Dinas Pertanian dan Peternakan	67.525.060.000	58.335.000.000	(9.190.060.000)
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	42.301.090.000	36.230.010.602	(6.071.079.398)
33	Dinas Koperasi dan UMKM	29.067.000.000	25.080.753.070	(3.986.246.930)
34	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	25.567.360.000	21.616.397.000	(3.950.963.000)

NO	SKPD	APBD TA 2016	PERUBAHAN RKPd TAHUN 2016	SELISIH (+/-)
1	2	3	4	5
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.500.000.000	25.061.760.860	(2.438.239.140)
36	Sekretariat DPRD	272.789.987.600	221.765.000.000	(51.024.987.600)
37	RSUD Banten	127.220.200.000	135.999.321.669	8.779.121.669
38	Satuan Polisi Pamong Praja	30.120.000.000	27.458.637.700	(2.661.362.300)
39	RSU Malingping	27.500.000.000	26.902.000.000	(598.000.000)
40	Inspektorat Provinsi	16.400.000.000	17.400.000.000	1.000.000.000
41	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	5.000.000.000	4.761.233.949	(238.766.051)
42	Kantor Penghubung	9.500.000.000	9.281.000.000	(219.000.000)
	JUMLAH	3.609.341.540.600	3.329.740.023.532	(279.601.517.068)

Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai rencana kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPd Provinsi Banten Tahun 2016 khususnya yang masuk ke dalam belanja langsung SKPD secara lengkap disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut.